

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA 2022)**



KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Tujuan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah.....	8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	10
BAB IV PENUTUP.....	11

KATA PENGANTAR

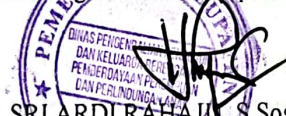
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat disusun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Perubahan RKPD dengan mempertimbangkan evaluasi dari capaian target kinerja yang diperoleh sampai dengan triwulan II.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritikan dan saran masukan demi penyempurnaan untuk penyusunan dan penyajian dokumen yang sama pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur



SRI ARDIRAHAJU, S.Sos, MAP
Pembina Tk. I

NIP. 196910161999032007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan - permasalahan

yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2022;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores

Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2022 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

- b. Untuk merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan perubahan renja dan menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Perubahan. Renja DP2KBP3A,

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Menjelaskan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja dengan hasil analisis kebutuhan pada Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2022, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun terakhir periode RPJMD tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja PD mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan pada pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada DP2KBP3A masih rendah,, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang pada saat sekarang dilaksanakan langsung oleh petugas lapangan. Hasil evaluasi PD DP2KBP3A Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan kegiatan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program- program. Pencapaian kinerja PD DP2KBP3A Kab. Flores Timur. Gambaran kinerja PD DP2KBP3A sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB II**HASIL EVALUASI RENTA PERANGKAT DAERAH****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renta Perangkat Daerah Triwulan II**

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2022, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun terakhir periode RPJMD tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renta Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renta PD mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan pada pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada DP2KBP3A masih rendah,, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang pada saat sekarang dilaksanakan langsung oleh petugas lapangan. Hasil evaluasi PD DP2KBP3A Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan kegiatan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program- program. Pencapaian kinerja PD DP2KBP3A Kab. Flores Timur. Gambaran kinerja PD DP2KBP3A sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA	REALISASI TARGET KINERJA TW II TAHUN 2022
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100	67% (30 822 Orang)
	Cakupan Akseptor Baru (%)	100	18,96% (1116 Orang)
	Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100	22 Kelompok
Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20%	13 Orang
	Jumlah Lembaga Perempuan yang terbina	19	0
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	100	97% (61.642 Orang)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	12 Lembaga Anak

Dari Tabel yang ada menunjukkan bahwa hampir semua program belum mencapai hasil optimal, dengan demikian maka pada sisa waktu tahun 2022 di upayakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA. Berdasarkan indikator kinerja dan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB
2. Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan KB
3. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam program KB
4. Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai.
5. Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran belum optimal.
6. Fasilitas sarana prasarana publik yang responsif gender belum tersedia secara memadai.

Selain itu salah satu isu yang mengemuka berdasarkan amanat Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Sekretariat dalam upaya percepatan penurunan stunting daerah.

2.4 Review Terhadap Perubahan Renja

Review atau telaah terhadap rancangan perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdapat perubahan pendanaan pada program dan kegiatan. Perubahan program kegiatan dan pendanaan tersebut terdapat pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Renja 2022 sebesar Rp. 3.795.520.000 dan setelah perubahan RKPD 2022 menjadi Rp. 3.459.242.120. Perubahan pendanaan tersebut mengalami penurunan dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak diakomodir namun pada beberapa kegiatan pada program tersebut terdapat kenaikan pendanaan.

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Perubahan Renja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 memuat 6 Program, 14 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 11.676.123.785, adapun perubahan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Membiayai 1 Program, 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.459.242.120

2. Program- program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- Program Pembinaan keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Membiayai 2 Program, 4 Kegiatan dan 9 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8056.881.665. Pada program Pembinaan Keluarga Berencana terdapat pembiayaan kegiatan dari dana DAK Fisik dan Non Fisik.

3. Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak terdiri dari:

- Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak

Membiayai 4 Program, 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.160.000.000. Adapun rincian program/ kegiatan dan pendanaan perubahan renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022. Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur


Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP

Pembina TK I

NIP. 19691016 199903 2 007

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENJA TRIWULAN II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan										Indikator Program/ Kegiatan (Satuan)	LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENJA TRIWULAN II																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NOMENKLATUR KEPMEN 050 - 3708 TAHUN 2020											Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RESNTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Diarahkan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022 (%)		K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM		KEGIATAN / SUB KEGIATAN										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP										K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	M																																								KEGIATAN	N	SUB KEGIATAN	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3										4			5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%			15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENCANA TRITULAN DI...

[illegible]

* LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENJA TRIWULAN II

[illegible]

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENCANA TRIVULAN II

[illegible]

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENJA TRIWULAN II

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENCANA TRIWULAN II										
2	14	03	2.03	00	Pembinaan Sarana Pelayanan KB	Kendaraan roda empat untuk akseptor-pendamping an keluarga terdaring (unit Roda 2)	9.749.461,000		30	2.175.000,000
						Jumlah ROR KB yang dibutuhkan (unit)			231	
						Jumlah KIR Stupa Sikah yang dibutuhkan (unit)			22	
						Jumlah sarana pramusSP 14/Person al komputer yang dibutuhkan (unit)			16	
2	14	03	2.03	00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Kesehatan Teramanak Jaringin dan Juganaprya	Jumlah peserta kawaling KB (orang)	1.250	441.739,000	-	16.110
						Jumlah peserta kawaling KB (orang)		247.103,000		25.000,000
						Jumlah Rencana yang dibuat (orang)				20.000,000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Berpangkat	Jumlah klinik yang mendukung dukungan operasional (klinik)	63	510.300,000	63	150.953,000
										32.500,000
2	14	03	2.04		Pembinaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab. Kota dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber KB			986.000,000	39.355,200	52.000,000
2	14	03	2.04	01	Penggiatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber KB	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan perhitungan maksimum tahunan berjalan dokumen)	1	336.000,000	-	12.000,000

LAMPTRAN 2 EVALUASI RENIA TRIWULAN II

[illegible]

Lampiran 3
Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Kabupaten Flores Timur

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2-08	2-14	0-0	01		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			13,712,520,000			11,676,123,785		(2,036,396,215)	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,795,520,000			3,459,242,120		(336,277,880)	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,795,520,000		100	3,459,242,120		(336,277,880)	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100			100				
						Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	7			7				
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000			59,200,000		29,200,000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	7	30,000,000	Larantuka (OPD)	5	59,200,000	Larantuka (OPD)	29,200,000	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,172,520,000			2,255,419,400		82,899,400	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	2,129,000,000	Larantuka (OPD)	14	2,205,619,400	Larantuka (OPD)	76,619,400	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (Bulan)	12	43,520,000	Larantuka (OPD)	12	49,800,000	Larantuka (OPD)	6,280,000	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		180,500,000			135,865,000		(44,635,000)	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (jenis)	5	40,000,000	Larantuka (OPD)	0	0	Larantuka (OPD)	(40,000,000)	APBD II (DAU)

URUSAN	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	3	25,000,000		0	0		(25,000,000)	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan (jenis)	20	4,500,000	Larantuka (OPD)	20	4,502,700	Larantuka (OPD)	2,700	APBD II (DAU)
				Jumlah Jenis ATK yang disediakan (jenis)		32	28,000,000		32	25,497,300		(2,502,700)		
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar)	40000	16,000,000	Larantuka (OPD)	4,000	15,000,000	Larantuka (OPD)	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos)	250	15,000,000	Larantuka (OPD)	500	30,000,000	Larantuka (OPD)	15,000,000	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	40	52,000,000	Larantuka (OPD)	24	60,865,000	Larantuka (OPD)	8,865,000	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,342,500,000			922,760,000		(419,740,000)	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (lembar)	120	1,100,000	Larantuka (OPD)	12	1,000,000	Larantuka (OPD)	(100,000)	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58,000,000	Larantuka (OPD)	12	28,960,000	Larantuka (OPD)	(29,040,000)	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	93	1,283,400,000	Larantuka (OPD)	93	892,800,000	Larantuka (OPD)	(390,600,000)	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,000,000			85,997,720		15,997,720	
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	15,000,000	Larantuka (OPD)	5	12,000,000	Larantuka (OPD)	(3,000,000)	APBD II (DAU)
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)		5	45,000,000		5	67,997,720		22,997,720		
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	5,000,000	Larantuka (OPD)	1	3,000,000	Larantuka (OPD)	(2,000,000)	APBD II (DAU)
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	5,000,000	Larantuka (OPD)	3	3,000,000	Larantuka (OPD)	(2,000,000)	APBD II (DAU)

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		438,800,000			160,000,000		-278,800,000		
2	08	02			Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20	285,000,000		20	85,000,000		-200,000,000	
					Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina	19	19							
					Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	100	100							
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan		72,000,000			55,000,000		-17,000,000		
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)	46	35,000,000	19 Kecamatan	16	35,000,000	19 Kecamatan	0	APBD II (DAU)
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150	37,000,000	Larantuka-Ibukota Kabupaten	150	20,000,000	Larantuka-Ibukota Kabupaten	-17,000,000	APBD II (DAU)
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			213,000,000			30,000,000		-183,000,000	APBD II (DAU)
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	178,000,000	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebao), (Solor Barat: Desa Titehena)	16	30,000,000	19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemie, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebao), (Solor Barat: Desa Titehena)	-148,000,000	APBD II (DAU)

URUSAN	BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022						BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
							SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah Hasil Karya Perempuan (jenis)	5	35,000,000	19 Kecamatan	0	0	19 Kecamatan	-35,000,000	
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)	20	82,000,000		20	30,000,000		-52,000,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			82,000,000			30,000,000		-52,000,000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)	1	82,000,000	19 Kecamatan	1	30,000,000	19 Kecamatan	-52,000,000	APBD II (DAU)
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)	125	41,500,000		125	20,000,000		-21,500,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		41,500,000			20,000,000		-21,500,000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	1	41,500,000	Ibukota Kabupaten	1	20,000,000	Ibukota Kabupaten	-21,500,000	APBD II (DAU)
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	30,300,000		19	25,000,000		-5,300,000	APBD II (DAU)
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		30,300,000			25,000,000		-5,300,000	APBD II (DAU)
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	19	30,300,000	19 Kecamatan	19	25,000,000	19 Kecamatan	-5,300,000	APBD II (DAU)
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9,478,200,000			8,056,831,665		-1,421,318,335	
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100	9,317,000,000		100	7,947,681,665		-1,369,318,335	
						Cakupan Akseptor Baru (%)	100			100				

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG/ ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DATA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100			100				
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			42,500,000			30,000,000		-12,500,000	
2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KB/BPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)	76	42,500,000	Ibukota Kabupaten	76	30,000,000	Ibukota Kabupaten	-12,500,000	APROD II (DAK)
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		9,222,500,000			7,917,681,645		-1,304,818,355	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	6,950,000,000	19 Kecamatan	5	5,502,946,500	19 Kecamatan	-1,447,053,500	APROD II (DAK)
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket):		2,175,000,000			2,379,096,000		204,096,000	APROD II (DAK)
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayan KB	30		Larantuka (OPD)	32		Larantuka (OPD)		
						Jumlah unit saran Kelompok kegiatan ketaham dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (unit) kode rek 2.14.04.2.01.02	231		19 Kecamatan	58		19 Kecamatan		

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA / JAWABAN KERANGKA PENYUSUNAN TAHUNAN 2024						PERTAMBAHAN / BERKURANG / ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah unit saran Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKT, PTPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi)	22		Desa/Kel. Bora, Lewolaga, Larantuka, Ritabelang, Titehena, Kalike, Warwadin, Lile, Warwerang Kota, Sagu,	22		Desa/Kel. Bora, Lewolaga, Larantuka, Ritabelang, Titehena, Kalike, Warwadin, Lile, Warwerang Kota, Sagu,		
						- jumlah sarana prasarana SIGA/ Personal Komputer yang diadakan (unit)	16		Balai Penyuluhan KIB Kce: Wulanggitang, Demom Pagong, Solor Barat, Solor Timur, Ado Barat, Ado Timur, Ile Boleng, Adonara, Wihama, Kelubagolit	0		Balai Penyuluhan KIB Kce: Wulanggitang, Demom Pagong, Solor Barat, Solor Timur, Ado Barat, Ado Timur, Ile Boleng, Adonara, Wihama, Kelubagolit		
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	15800	20,000,000	19 Kecamatan	0	3,139,165	19 Kecamatan	-16,860,835	APPROB (DAU)
						Jumlah peserta konseling KB (orang)	250	25,000,000	19 Kecamatan	0	0	19 Kecamatan	-25,000,000	APPROB (DAU)
						Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	20,000,000	19 Kecamatan	0	0	19 Kecamatan	-20,000,000	APPROB (DAU)
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KIB Bergerak	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	63	32,500,000	19 Kecamatan	63	32,500,000	19 Kecamatan	0	APPROB (DAU)
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			52,000,000					-52,000,000	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)	1	12,000,000	19 Kecamatan	0	0	19 Kecamatan	-12,000,000	APPROB (DAU)
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	5	40,000,000	Desa Ungalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solbel), Adobala (Klubagolit)	0	0	Desa Ungalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalota (Adonara Timur), Desa Kenere (Solbel), Adobala (Klubagolit)	-40,000,000	APPROB (DAU)
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	80	161,200,000		80	109,200,000		-52,000,000	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-)	SUMBER DANA
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			161,200,000			109,200,000		-52,000,000	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang)	80	30,000,000	Ibukota Kabupaten	0	0	Ibukota Kabupaten	-30,000,000	APBD II (DAU)
						Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali)	1	22,000,000	Ibukota Kabupaten	0	0	Ibukota Kabupaten	-22,000,000	APBD II (DAU)
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	61	109,200,000	19 Kecamatan	61	109,200,000	19 Kecamatan	0	APBD II (DAU)